

LAPORAN BULANAN JULI 2026

POKJA POLHUKAM

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

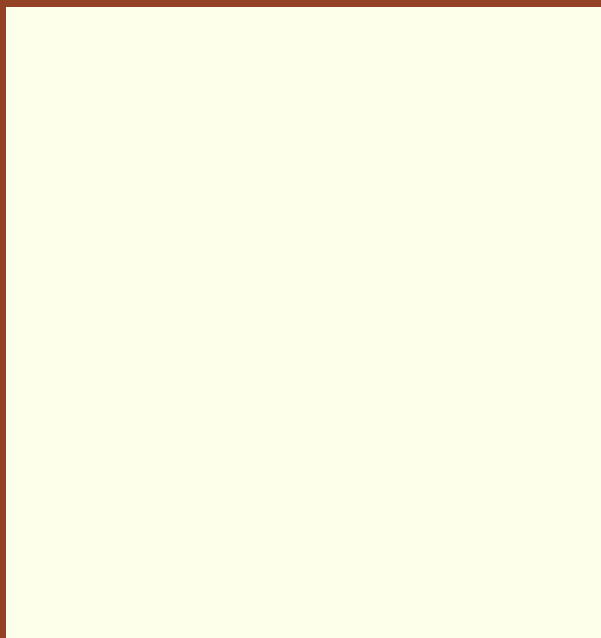


02 Juli 2026



02/07/2026

PERTEMUAN DI SEKRETARIAT DEWAN
ADAT JALAN CASUARINA KAIMANA



PERMASALAHAN

1. Belum tertatanya peta tanah adat dan hutan adat marga sebagai pemilik Hak Ulayat secara administratif pertanahan agar setiap marga memiliki batas tanah dan hutan adat secara legal dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
2. Secara tradisional masyarakat adat zaman dulu bahkan sampai sekarang masih memiliki batas tanah adat dan hutan adat yang berpatokan pada tanjung, gunung, sungai, atau kali dan bukit serta batas-batas alam lainnya yang tidak dipahami generasi sekarang sehingga menjadi perdebatan sengit antar marga tentang siapa pemilik hak ulayat sesungguhnya atas tanah adat dan hutan adat.
3. Penyelesaian batas tanah adat untuk pembangunan SMAN IV Wanggita Arguni Atas telah dimediasi Pemda setempat via Dinas Pendidikan sebanyak 2 kali pertemuan, Dewan Adat sebanyak 4 kali berdasarkan bukti survey lapangan antar marga yang bersengketa namun belum ada kesepakatan dua belah pihak dan berbuntut pada penghancuran kaca-kaca jendela kantor Dewan Adat Kabupaten Kaimana.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Arahkan umum ketua tim MRP Prov. Papua Barat tentang maksud dan tujuan pertemuan dengan pemilik hak ulayat (keluarga watora) di kampung wanggita distrik arguni atas untuk mendapatkan informasi dari keluarga watora yang akan dibandingkan dengan informasi dari keluarga werfete yang mengklaim bahwa mereka adalah pemilik hak ulayat.
2. Penjelasan teknis ketua bidang adat yang juga sebagai anggota MRP tentang peran MRP sebagai mediator penyelesaian konflik atau sengketa tanah antar marga/fam/keret orang asli papua.
3. Tanggapan keluarga Sirfefa melalui juru bicara (Hidayat Sirfefa) bahwa persoalan tanah adat di kampung wanggita sebagai lokasi pembangunan SMA Negeri IV Wanggita distrik Arguni Atas telah diselesaikan melalui beberapa kali pertemuan, yaitu (1). Pertemuan keluarga besar marga Watora dan Keluarga besar dimediasi oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaimana; (2). Pertemuan keluarga besar kedua marga tersebut dengan Pemda setempat yang dihadiri Sekda, Dinas Pertanahan, Bappeda, Asisten I Sekda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Adat kedua belah pihak bertempat di ruang rapat kantor bupati Kaimana; (3). Dilakukan Pertemuan berikut atas permintaan keluarga Werfete diselesaikan masalahnya bertempat di rumah bapak Abdullah Werfete, namun juga tidak menyelesaikan masalah dan kedua belah pihak bersepakat ke lapangan (lokasi pembangunan SMA Negeri IV Wanggita) untuk melihat kebenaran siapa pemilik hak atas tanah dan hutan adat.



KEGIATAN STRATEGIS

4. Melakukan survey untuk menginventarisir dan mengidentifikasi bukti fisik (berupa tanaman sagu, pala), dan taman jangka panjang lainnya di lokasi pembangunan SMA tersebut yang diikuti Ketua Dewan Adat, Kapolsek, Babinsa, Kepala Distrik Arguni Atas, masyarakat kampung Finyara dan masyarakat kampung Wanggita, para saksi kedua belah pihak terbukti bahwa pemilik hak ulayat adalah marga Watora.
5. Kedua belah pihak bersepakat atas pemberian waktu sanggahan dengan ketentuan waktu 7 hari, dan penanda tangan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah. Namun tidak ditepati oleh pihak Werfete dan mengulur waktu sampai 2 Minggu, namun Dewan Adat masih toleran.
6. Saat ditentukan waktu dan hari untuk tanda tangan berita acara secara bersama-sama dan sudah disepakati hari Sabtu tanggal 2 Juli 2026 Pukul 10.00 WIT, namun keluarga Werfete tidak hadir dan ditunda sampai jam 12.00 WIT, kemudian ditambah waktu sampai pukul 15.00 WIT karena keluarga Werfete tidak hadir, maka demi hukum dan keadilan Dewan Adat Putuskan dan menetapkan Kemenangan adalah marga Watora, keputusan tersebut final dan mengikat.
7. Semua proses dan tahapan permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh keluarga Watora dan Sirfefa kepada tim MRP Prov. Papua Barat untuk diketahui bahwa keluarga besar Werfete tidak dapat membuktikan kebenaran hukum.



**dokumentasi 02 Juli 2026*

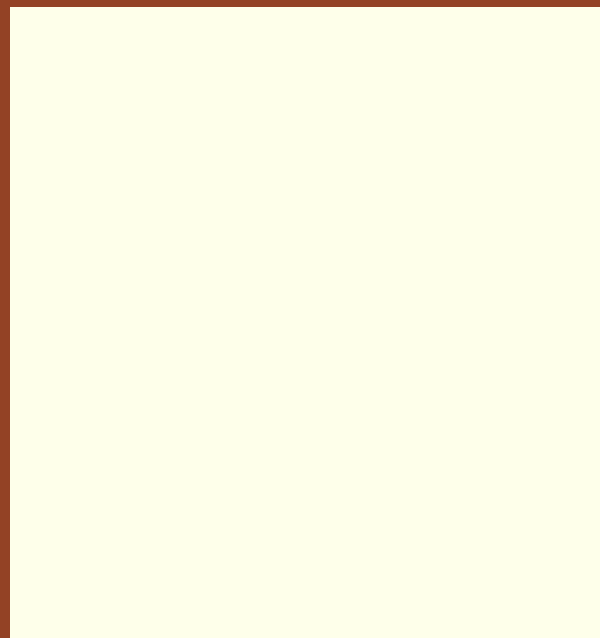
REKOMENDASI

1. Dewan Adat berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dapat memanggil pihak keluarga Werfete dan memberikan sanksi adat sesuai perlakuan mereka yang tidak sesuai dan melanggar norma adat berdasarkan kebiasaan hukum adat suku kuri-irarutu yang berlaku.
2. Dewan Adat dapat menyiapkan surat pernyataan sikap tidak mengulangi perbuatan yang salah dan ditanda tangani pihak keluarga Werfete, agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang atau perbuatan hukum yang salah dikemudian hari.
3. Disarankan agar tetua adat dari kedua belah pihak yang bersengketa dapat membangun harmoni sosial untuk memulihkan hubungan keluarga yang renggang menjadi rukun dan damai.

12 Juli 2026



12/07/2026



KOORDINASI POKJA POLHUKAM
DENGAN MASYARAKAT KAMPUNG
WANGGITA KAIMANA TERKAIT
PROYEK KERAMBA KEPITING



PERMASALAHAN

1. Proyek Pembangunan Keramba Kepiting tahun 2024 senilai Rp.1.000.000.000,- untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Distrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana gagal total.
2. Proyek Pembangunan Keramba Kepiting merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRP Fraksi Otsus (Sdr. Mudasir Bogra) yang dinilai fiktif karena tidak ada data fisik pembangunannya di lapangan.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Rapat dengar pendapat dan wawancara kami selaku anggota Pokja Polhukam BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan perwakilan marga-marga Furnusu Group untuk mendapatkan data dan informasi aktual di lapangan.
2. Evaluasi terhadap Proyek Pembangunan Keramba Kepiting tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- yang dinilai tidak berimbang antara input proyek dengan output proyek yang tidak memberikan hasil maksimal dan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat.
3. Laporan Masyarakat bahwa Yayasan Pribadi milik Sdr. Mudasir Bogra anggota DPRP Ketua Fraksi Otonomi Khusus yang mengelola Proyek Pembangunan Keramba Kepiting di Distrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana

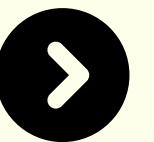
REKOMENDASI

1. Karena Pokir DPRP diperoleh dari Dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.000.000. maka disarankan Inspektorat Provinsi, BPKD, BPK dan KPK dapat melakukan evaluasi dan pemeriksaan proyek dimaksud berdasarkan laporan masyarakat.
2. BP3OKP selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pelaksanaan Otonomi Khusus dapat memanggil Anggota DPRP yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan laporannya untuk menilai kebenaran laporan masyarakat.
3. Agar Tugas dan Fungsi SHEK BP3OKP hanya terbatas pada sentra-sentra pemerintahan dan pembangunan dalam kota di daerah saja, namun bisa menjangkau seluruh daerah kabupaten, distrik dan kampung-kampung terpencil, terisolasi dan terjauh untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangun terutama program Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.





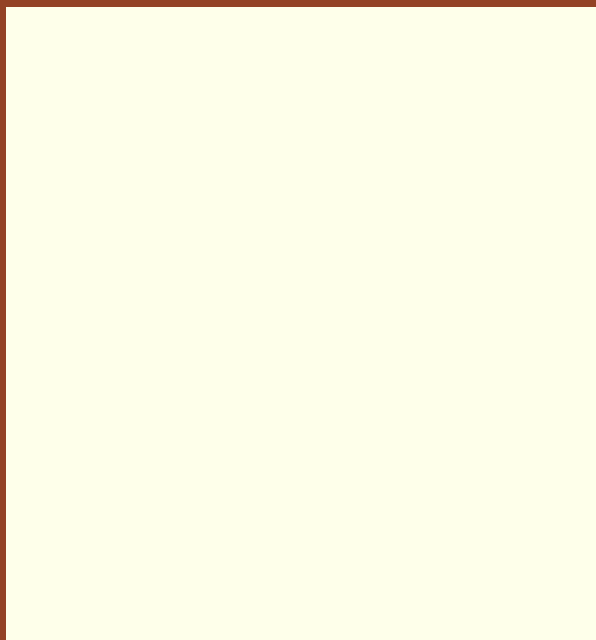
**dokumentasi 12 Juli 2026*



20 Juli 2026



20/07/2026



PERTEMUAN DENGAN KETUA ADAT
BAPAK LEWIE ORUW, SE TERKAIT
PEMALANGAN KANTOR SEKRETARIAT
DEWAN ADAT KABUPATEN KAIMANA

PERMASALAHAN

1. Keputusan Dewan Adat atas persengketaan tanah adat antara marga Werfete dengan marga Watora ditetapkan bahwa pemilik hak Ulayat adalah marga Watora dan tidak diterima marga Werfete yang berakibat anggota pihak Werfete menggugurkan kaca-kaca jendela Kantor Sekretariat Dewan Adat Kaimana.
2. Pada saat survey lapangan untuk memastikan kepemilikan hak Ulayat yang didampingi Kapolsek Arguni Atas dan Komandan Babinsa Arguni Atas dengan menghadirkan Tua-tua Adat dari Kampung Wanggita, Sawatawera, Rofada, Warwarsi dan sejumlah saksi dari kampung tersebut namun keluarga Werfete tetap berisi keras untuk mempertahankan kemauannya yang tidak berdasarkan bukti-bukti fisik di lapangan.
3. Sengketa tanah untuk pembangunan SMA Negeri 4 Wanggita di Distrik Arguni Atas telah dilaporkan Ketua Dewan Adat ke Peradilan hukum/ Polres Kaimana untuk proses lebih lanjut untuk mendapatkan keputusan hukum yang pasti dan kepuasan hukum bagi yang bersengketa.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Penjelasan Ketua Dewan Adat Kaimana berdasarkan temuan hasil survey di lapangan sesuai bukti-bukti fisik batas hak Ulayat marga, jenis tanaman jangka panjang berupa sagu, pala dan tanaman lainnya sebagai bukti hukum.
2. Arahan Komandan Babinsa dan Kapolsek Distrik Arguni Atas tentang tata cara penyelesaian sengketa tanah secara aman dan damai serta melarang sumpah adat (makan tanah)
3. Pembuatan Keputusan Dewan Adat, Berita Acara Penyelesaian Perkara, dan Pernyataan Sikap Tidak Berbuat Masalah, namun hanya disetujui dan mau ditanda tangani Pihak Watora sedangkan Pihak Werfete enggang menerima sampai menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (final and banding)

REKOMENDASI

1. Melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan mengapa pihak Werfete sudah benar-benar salah dan tidak ada bukti hukum sebagai pemilik hak Ulayat namun masih berusaha untuk membelah diri untuk menang dalam perkara.
2. Agar Dinas Pendidikan sebagai Koordinator Pengelola Proyek Pembangunan Gedung SMA Negeri 4 Wanggita dengan nilai milyaran rupiah tidak terjebak dengan hasutan keluarga Werfete untuk meminta uang panjar karena mereka sesungguhnya bukan pemilik Hak Ulayat.
3. Agar semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi dapat menerima keputusan Dewan Adat Kaimana sesuai norma hukum adat yang berlaku



*dokumentasi 20 Juli 2026

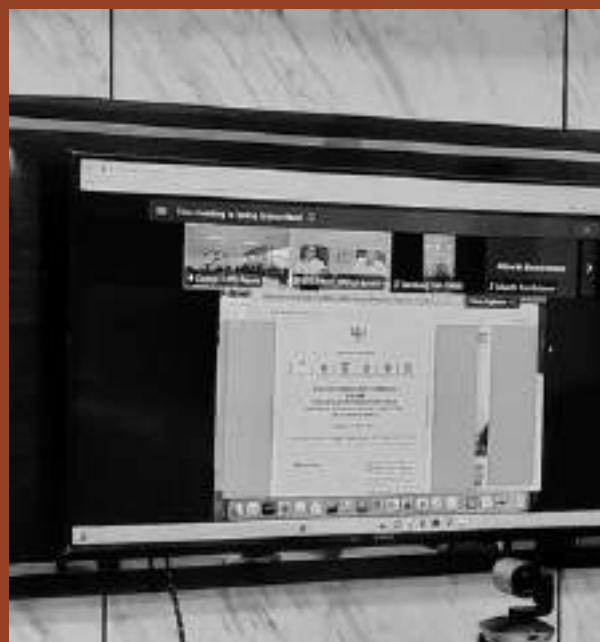


23 Juli 2026



23/07/2026

PERTEMUAN VIA ZOOM MEETING KETUA KOMITE
EKSEKUTIF DENGAN ANGGOTA BP3OKP RI SE-TANAH
PAPUA BERSAMA ANGGOTA POKJA PAPUA SEHAT, PAPUA
CERDAS, PAPUA PRODUKTIF DAN PAPUA DAMAI (PAPUA
POLHUKAM) DI RUANG RAPAT LANTAI II GJPB PB



PERMASALAHAN

1. Inisiasi negara terhadap pembentukan Komite Eksekutif untuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua masih bersifat parsial dan belum pernah dibahas dalam rapat koordinasi program kerja dan pembagian kewenangan antara BP3OKP dan Komite Eksekutif secara transparan dan komprehensif.
2. Penanganan konflik sosial mengenai kekerasan fisik masih bersifat sektoral ditangani oleh kementerian/lembaga dan lembaga non struktural secara terpisah dan disosiatif. Belum dilakukan secara terpadu antar Komnas HAM, Pemda atau Bupati setempat, TNI dan Polri serta institusi terkait dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.
3. Belum ada model strategi penyelesaian konflik di Tanah Papua dan belum ada Polical Will pemerintah untuk membatasi penambahan pasukan TNI di Tanah Papua karena dinilai memperpanjang masalah stabilitas keamanan di daerah.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Arahan Ketua Komite Eksekutif tentang 19 point Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang salah satunya adalah penanganan konflik sosial secara terpadu untuk menciptakan perdamaian yang hakiki dan sejahtera.
2. Semua lembaga negara, OPD, dan stakeholders (tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda termasuk LSM) bersama-sama merumuskan model strategi penyelesaian konflik di Tanah Papua.
3. Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi Market di daerah agar hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan, petani terus berkebun, adanya lapangan kerja, meminimalisir angka pengangguran dan masalah-masalah sosial di daerah yang membuat rasa tidak aman dan nyaman.
4. Kebijakan pemerintah menghadirkan 1.200 mahasiswa dari 10 kampus untuk ditempatkan ke Tanah Papua khususnya daerah-daerah transmigrasi yang berpenduduk Orang Asli Papua (OAP) guna membantu Percepatan Program Papua Produktif.



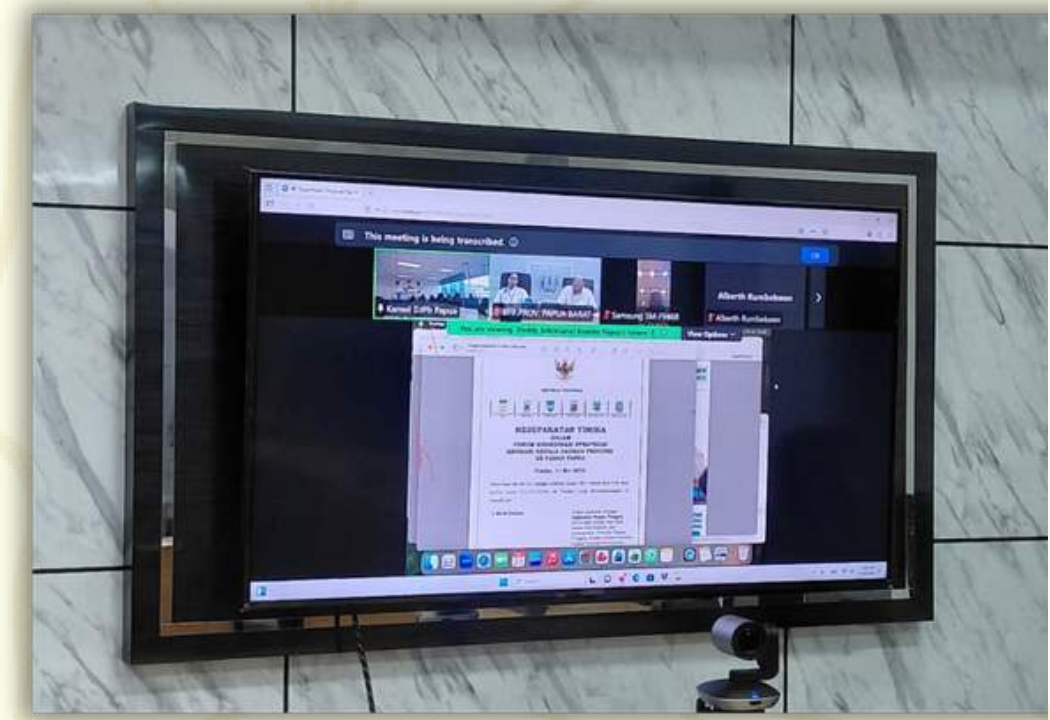
**dokumentasi 23 Juli 2026*



KEGIATAN STRATEGIS

5. Tanggapan semua anggota BPP pada intinya adalah sebagai berikut : (a). Sinergi dan kolaborasi BP3OKP dengan Komite Eksekutif serta pembagian kewenangan yang jelas; (b). Membangun harmoni sosial yang dapat merajut kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa serta berseberangan dengan NKRI; (c). Membatasi TNI yang diturunkan dari Pusat karena dinilai mengganggu stabilitas keamanan di daerah; (d). Daerah-daerah 3T (terdepan, terluar dan terjauh) tidak dapat dijangkau karena tidak ada biaya perjalanan dinas untuk melakukan pelayanan publik dan deteksi dini terhadap situasi keamanan.

6. Tanggapan anggota Pokja Polhukam (Papua Damai) di Provinsi Papua Barat, antara lain : (a). Masalah Wasior Berdarah di kabupaten Teluk Wondama yang tidak pernah ditanggapi dan dipulihkan pemerintah pusat sesuai janji; (b). Masalah 30 orang anggota Kombatan TPN/OPM Moskona Utara kabupaten Teluk Bintuni yang telah menyerah dan kembali ke NKRI harus diberikan jaminan khusus dan diperhatikan kesejahteraannya; (c). Masalah stabilitas keamanan di Yamor kabupaten Kaimana yang berbatasan dengan kabupaten Nabire, Dogiai, Deyai, Mimika, Teluk Wondama; (d). Masalah meningkatnya frekwensi pencurian kayu bernilai ekonomi tinggi dari distrik Yamor ke Nabire yang di-beck-up oknum anggota TNI dan Polri; (e). Masalah ilegal fishing, pencurian ikan oleh kapal asing di perbatasan perairan kabupaten Kaimana Papua Barat dengan kabupaten Dobo dan Kabupaten Tual Maluku Tenggara.



**dokumentasi 23 Juli 2026*

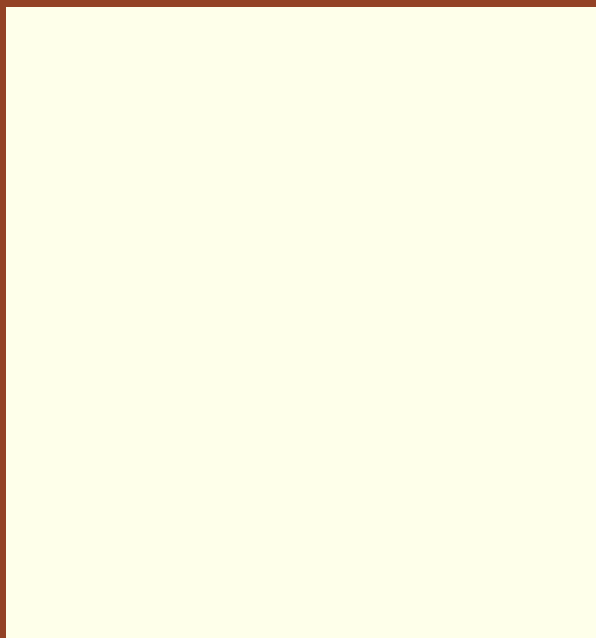
REKOMENDASI

1. Disarankan harus ada Satuan Kerja (SAKER) BP3OKPB yang mengolah uang secara khusus di masing-masing provinsi untuk mempercepat pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua, karena selama ini kami menggunakan uang pribadi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan otonomi khusus di daerah.
2. Disarankan supaya pengiriman pasukan TNI dari pusat ke Papua ditiadakan karena meresahkan masyarakat untuk mencari nafkah.
3. Disarankan BO3 OKP dan Komite Eksekutif harus bersinergi dan berkolaborasi serta berkoordinasi memformulasikan : program kerja dan pembagian kewenangan kedua lembaga agar tercipta keharmonisan pekerjaan.
4. Disarankan agar setiap triwulan dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi prestasi dan kinerja BPP dalam mendukung pelaksanaan otonomi khusus di daerah serta strategi taktik yang mendukung legasi presiden dan wakil presiden

26 Juli 2026



26/07/2026



PERTEMUAN DENGAN

ANGGOTA MRP PAPUA BARAT



PERMASALAHAN

1. Pimpinan MRP Papua Barat mendapat surat dari Ketua Forum Keluarga Besar Werfete Perihal masalah batas hak ulayat pembangunan Gedung SMA Negeri IV Wanggita Distrik Arguni Atas.
2. Lokasi Pembangunan Gedung SMA Negeri IV Wanggita telah disepakati dibangun diatas Tanah Adat Marga Watora dimulai pada awal Tahun Anggaran 2026, namun digugat Marga Werfete yang mengatas nama sebagai Pemilik Hak Ulayat sehingga menyebabkan pekerjaan bangunan diberhentikan sementara sambil menunggu penyelesaian persengketaan tanah pada lokasi pembangunan SMA Negeri dimaksud.
3. Adanya ancaman dari marga Werfete, Fenetiruma, dan Bogra untuk merusak rumah dan penebangan tanaman jangka panjang berupa sagu, pala dan tanaman lain milik marga Watora dan Sirfefa membuat ketidak nyamanan warga masyarakat kampung Wanggita

KEGIATAN STRATEGIS

1. Arahan umum ketua tim MRP Prov. Papua Barat tentang maksud dan tujuan pertemuan dengan pemilik hak ulayat (keluarga watora) di kampung wanggita distrik arguni atas untuk mendapatkan informasi dari keluarga watora yang akan dibandingkan dengan informasi dari keluarga werfete yang mengklaim bahwa mereka adalah pemilik hak ulayat.
2. Penjelasan teknis ketua bidang adat yang juga sebagai anggota MRP tentang peran MRP sebagai mediator penyelesaian konflik atau sengketa tanah antar marga/fam/keret orang asli papua.
3. Tanggapan keluarga Sirfefa melalui juru bicara(Hidayat Sirfefa) bahwa persoalan tanah adat di kampung wanggita sebagai lokasi pembangunan SMA Negeri IV Wanggita distrik Arguni Atas telah diselesaikan melalui beberapa kali pertemuan, yaitu (1). Pertemuan keluarga besar marga Watora dan Keluarga besar dimediasi oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaimana; (2). Pertemuan keluarga besar kedua marga tersebut dengan Pemda setempat yang dihadiri Sekda, Dinas Pertanahan, Bappeda, Asisten I Sekda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Adat kedua belah pihak bertempat di ruang rapat kantor bupati Kaimana; (3). Dilakukan Pertemuan berikut atas permintaan keluarga Werfete diselesaikan masalahnya bertempat di rumah bapak Abdullah Werfete, namun juga tidak menyelesaikan masalah dan kedua belah pihak bersepakat ke lapangan (lokasi pembangunan SMA Negeri IV Wanggita) untuk melihat kebenaran siapa pemilik hak atas tanah dan hutan adat.
4. Melakukan survey untuk menginventarisir dan mengidentifikasi bukti fisik (berupa tanaman sagu, pala), dan taman jangka panjang lainnya di lokasi pembangunan SMA tersebut yang diikuti Ketua Dewan Adat, Kapolsek, Babinsa, Kepala Distrik Arguni Atas, masyarakat kampung Finyara dan masyarakat kampung Wanggita, para saksi kedua belah pihak terbukti bahwa pemilik hak ulayat adalah marga Watora.

KEGIATAN STRATEGIS

5. Kedua belah pihak bersepakat atas pemberian waktu sanggahan dengan ketentuan waktu 7 hari, dan penanda tangan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah. Namun tidak ditepati oleh pihak Werfete dan mengulur waktu sampai 2 Minggu, namun Dewan Adat masih toleran.
6. Saat ditentukan waktu dan hari untuk tanda tangan berita acara secara bersama-sama dan sudah disepakati hari Sabtu tanggal 2 Juli 2026 Pukul 10.00 WIT, namun keluarga Werfete tidak hadir dan ditunda sampai jam 12.00 WIT, kemudian ditambah waktu sampai pukul 15.00 WIT karena keluarga Werfete tidak hadir, maka demi hukum dan keadilan Dewan Adat Putuskan dan menetapkan Kemenangan adalah marga Watora, keputusan tersebut final dan mengikat.
7. Semua proses dan tahapan permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh keluarga Watora dan Sirfefa kepada tim MRP Prov. Papua Barat untuk diketahui bahwa keluarga besar Werfete tidak dapat membuktikan kebenaran hukum.



**dokumentasi 26 Juli 2026*

REKOMENDASI

1. Dewan Adat berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dapat memanggil pihak keluarga Werfete dan memberikan sanksi adat sesuai perlakuan mereka yang tidak sesuai dan melanggar norma adat berdasarkan kebiasaan hukum adat suku kuri-irarutu yang berlaku.
2. Dewan Adat dapat menyiapkan surat pernyataan sikap tidak mengulangi perbuatan yang salah dan ditanda tangani pihak keluarga Werfete, agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang atau perbuatan hukum yang salah dikemudian hari.
3. Disarankan agar tetua adat dari kedua belah pihak yang bersengketa dapat membangun harmoni sosial untuk memulihkan hubungan keluarga yang renggang menjadi rukun dan damai.



**dokumentasi 26 Juli 2026*

PAPUA POLHUKAM



JULI 2026



Badan Pengarah Papua

REPORT MOUNTHLY

JULI 2026

POKJA PAPUA SEHAT

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan
Papua Barat

JULI 2026



Mobile Health Service-RS TERAPUNG BINTUNI



Operasi Perdana di Pesisir Terpencil
15–16 Juli 2026: Kapal RS Terapung Bintuni Sehat resmi beroperasi menjangkau Distrik Tomu, Teluk Bintuni. Pelayanan komprehensif mencakup pemeriksaan umum, imunisasi, skrining TBC-HIV, konsultasi gizi, hingga **keberhasilan 2 tindakan operasi anestesi umum** di ruang operasi kapal. Wujud nyata peran BP3OKP dari perencanaan, penganggaran hingga eksekusi langsung di lapangan.



1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi kelembagaan, penyelarasan kebijakan enam provinsi Papua, dan penguatan RAPPP 2025–2029.

P.1 Rakor BPP + Komite Eksekutif BP3OKP Perwakilan 6 Provinsi Papua

23 Juli 2026 Kantor BPP, Lantai 4 dan 5, Jayapura



Rapat koordinasi Pertama antara Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif BP3OKP dari 6 provinsi Papua, dipimpin Ketua Komite Eksekutif dan Pimpinan BPP. Ketua Komite Eksekutif memaparkan kerangka dua sayap: sayap kanan (percepatan pembangunan — 8 ASA, quick wins, RPJMN) dan sayap kiri (domain Otsus — kebijakan strategis, tata kelola keuangan). Dari 19 agenda RAP, penekanan pada Papua Damai (model Aceh), restrukturisasi MBG berbasis komunitas, dan PSN per provinsi. Adapun isu strategis yang di bahas yaitu optimalkan layanan Kesehatan, Pendidikan Pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi Produktif, penguatan kapasitas kelembagaan hingga pentingnya menciptakan daerah yang kondusif dan aman sebagai percepatan pembangunan di tanah Papua

📌 **BP3OKP:** BP3OKP Papua Barat mendorong agar kewenangan dan koordinasi antar lembaga diperjelas dalam regulasi. Serta mempererat Koordinasi lintas pemangku kepentingan, Bersama-sama mengawal pelaksanaan otonomi khusus jilid II demi terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas Papua Produktif dan Papua Damai

✓ **Capaian:** Fondasi sinergi kelembagaan BPP–Komite Eksekutif terbangun.

P.2 Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua

30 Juli 2026 Ballroom Gedung BPKAD Kab. Mimika (Luring) & Zoom



Rapat koordinasi nasional sehubungan dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Forum ini diperlukan untuk memperkuat sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan RAPPP.

Bappenas menekankan pentingnya costing program (Papua Sehat, Cerdas, Produktif) yang mempertimbangkan tipologi wilayah berbeda: pesisir vs. pegunungan. Dorongan konsolidasi tiga pilar utama BP3OKP (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri) dan optimalisasi perwakilan BP3OKP di 6 provinsi.

✓ **Capaian:** Sinergi implementasi RAPPP 2025-2029 diperkuat; roadmap konektivitas antarprovinsi Papua diusulkan; konsolidasi tiga pilar BP3OKP (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri) disepakati.

2 ASPEK PERENCANAAN

Tonggak akuntabilitas Dana Otsus se-Tanah Papua dan asistensi penguatan kelembagaan fiskal daerah Papua Barat.

P.3 Rapat Koordinasi Perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS se Wilayah Tanah Papua

16 Juli 2026 • Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura



Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tatakelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus se-Wilayah Tanah Papua yang diselenggarakan di Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, pada 16 Juli 2026. Capaian utama: pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama tentang Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Dana Otsus Papua oleh seluruh Gubernur, Bupati / walikota setanah Papua dan Ketua DPRP se-6 Provinsi Papua.

Deklarasi memuat 18 Rencana Aksi yang mencakup: percepatan Perdasus OAP, penyusunan Pergub sistem penatausahaan penerimaan Otsus, penandaan/tagging Dana Otsus dalam SIPD-SIKD, integrasi sistem SIPPP, monitoring berbasis data real-time, dan koordinasi KPK-BPK dalam pengawasan Dana Otsus.

📌 **BP3OKP:** BP3OKP mengawal sebagai TONGGAK AKUNTABILITAS, seluruh Gubernur se-6 Provinsi Papua menandatangani komitmen formal 18 rencana aksi tata kelola Dana Otsus. BP3OKP menegaskan bahwa deklarasi harus diiringi sistem monitoring yang terukur: setiap rencana aksi harus memiliki indikator, target, dan penanggung jawab yang jelas.

✓ **Capaian:** Deklarasi Komitmen Bersama 18 Rencana Aksi Dana Otsus ditandatangani oleh seluruh Gubernur dan Ketua DPRP se-6 Provinsi Papua; sistem tatakelola dan akuntabilitas Dana Otsus Papua memasuki era baru.

18 Rencana Aksi mencakup: Perdasus OAP, Pergub Sistem Penatausahaan Otsus, Tagging Dana Otsus dalam SIPD-SIKD, integrasi SIPPP, pelaporan berbasis data real-time, dan koordinasi KPK-BPK dalam pengawasan Dana Otsus Papua.

2 ASPEK PENGANGGARAN



P.3

Rapat Koordinasi Perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS se Wilayah Tanah Papua



16 Juli 2026



Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura

3 ASPEK PERENCANAAN

P.4

Evaluasi & Peninjauan Reoperasional Kapal RS Terapung Bintuni Sehat

8 Juli 2026 📍 Dinkes Kab. Teluk Bintuni & Dermaga Bintuni

Anggota BP3OKP RI dan Pokja Papua Sehat melaksanakan dua agenda di Teluk Bintuni pada 8 Juli 2026: pertama, menghadiri Rapat Evaluasi dan Reoperasional Kapal Apung Pelayanan Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Dinas Kesehatan; kedua, meninjau langsung Kapal Rumah Sakit Terapung 'Bintuni Sehat' yang bersandar di Dermaga Bintuni.

Pertemuan dengan tim yang terdiri dari Sekretaris Dinas, dokter-dokter, dan staf membahas strategi reoperasionalisasi agar Kapal RS Terapung dapat menjangkau wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil secara berkelanjutan.

📌 **BP3OKP:** BP3OKP memastikan reoperasionalisasi Kapal RS Terapung dilakukan dengan protokol yang jelas dan jadwal yang terstruktur. Ini adalah tindak lanjut langsung dari peninjauan di Juni 2026 — BP3OKP berperan sebagai motor penggerak agar program Floating Hospital tidak berhenti di seremoni, tetapi benar-benar beroperasi menjangkau masyarakat terpencil.

✓ **Capaian:** penganggaran operasional kapal sebesar **Rp10 Miliar** yang telah dimasukkan oleh BP3OKP ke dalam RPJMD/Bappeda untuk periode 2025–2029.



3 ASPEK PERENCANAAN



p.4 Peninjauan Reoperasional Kapal RS Terapung Bintuni Sehat

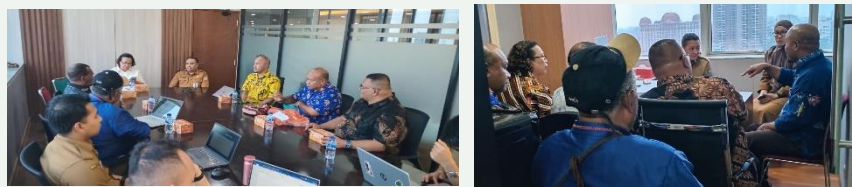
8 Juli 2026 Dinkes Kab. Teluk Bintuni & Dermaga Bintuni

2 ASPEK PENGANGGARAN

Asistensi kelembagaan fiskal daerah dan sosialisasi sistem manajemen kinerja pokja BP3OKP.

A.2 Konsultasi & Asistensi BUMD Kab. Pegunungan Arfak ke Kemendagri RI

📅 20–21 Juli 2026 📍 Kemendagri RI, Jakarta (Ditjen Otda & Direktorat Pendapatan Daerah)



Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat mengawal dan mendampingi Tim Penyusun Pembentukan BUMD Kabupaten Pegunungan Arfak dalam melakukan konsultasi dan asistensi ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, pada 20–21 Juli 2026.

Konsultasi dilakukan di dua direktorat: (1) Direktorat Penataan Daerah Otsus dan Otda — membahas legalitas bentuk BUMD, skema modal awal, dan potensi yang hendak dikelola; (2) Direktorat Pendapatan Daerah dan BUMD — membahas rancangan PERDA Pendirian BUMD Pegaf serta penajaman dan pembobotan rancangan regulasi.

📌 **BP3OKP:** BP3OKP Papua Barat memiliki peran fasilitator kelembagaan: Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih tergolong baru membutuhkan jembatan ke Kemendagri. BP3OKP memastikan rancangan PERDA BUMD Pegaf memiliki landasan yuridis yang kuat, skema permodalan yang realistis, dan potensi ekonomi lokal OAP yang teridentifikasi dengan baik.

✓ **Capaian:** Rancangan PERDA BUMD Kab. Pegaf dikonsultasikan resmi ke Kemendagri (2 direktorat); penajaman bentuk BUMD dan skema modal awal disepakati; legalitas rancangan regulasi daerah diperkuat.

A.3 Penguatan Kinerja Pokja Badan Pengarah Papua pada BP3OKP Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

📅 31 Juli 2026 📍 Ruang Rapat Triton Lt.2, GKN, Manokwari



Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja pokja Badan Pengarah Papua, pemahaman terhadap hak, kewajiban, tata kerja, serta penilaian kinerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata Kelola yang professional, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Penilai kinerja pokja BPP tahun 2026 dilaksanakan sebagai instrument strategis untuk mengoptimalkan kontribusi pokja dalam mendukung percepatan pembangunan otonomi khusus papua, dengan pengacu pada RAPP 2025-2029.

Di sisi lain, pokja memiliki hak atas honorarium, fasilitas perjalanan dinas, cuti dan jaminan sosial, serta berkewajiban menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, netralitas dan menghindari konflik kepentingan

📌 Tiga sasaran strategis pokja BPP:

1. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi pada output.
2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan papua yang efektif
3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif

✓ **Capaian:** 3 IKU Pokja BP3OKP resmi ditetapkan, berlaku mulai 1 Agustus 2026; ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan, efektivitas pembinaan implementasi program dan pelaksanaan komunikasi publik

3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BP3OKP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

L.1

HUT Bhayangkara Polri ke-80 — Sinergi Keamanan dan Pembangunan Papua

1 Juli 2026 • Convention Hall, Polda Papua Barat, Manokwari



Pokja BP3OKP Papua Barat turut hadir mewakili Ibu Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam rangkaian peringatan HUT Bhayangkara Polri ke-80 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Convention Hall Polda Papua Barat, pada Senin, 1 Juli 2026.

Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan dan sinergi antara BP3OKP dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera — sejalan dengan mandat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

🗳️ **BP3OKP:** Kehadiran BP3OKP dalam HUT Bhayangkara menegaskan peran lembaga sebagai mitra sinergis aparat keamanan. Di tengah situasi keamanan Papua yang masih dinamis — khususnya di Bintuni dan Moskona — sinergi BP3OKP–Polri menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak aman.

L.2

Kebaktian Tahunan Nasional ke-63 YPPII Batu — Papua dalam Semangat God's Arrow Generation

30 Juni–1 Juli 2026 • Balai Persekutuan Bukit Zaitun YPPII, Kota Batu, Jawa Timur



Pokja BP3OKP Papua Barat menerima undangan dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu kepada Anggota BP3OKP Se-Tanah Papua untuk menghadiri Kebaktian Tahunan Nasional ke-63 YPPII. Kebaktian dengan tema 'God's Arrow Generation' ini menghadirkan pembicara nasional: Hashim S. Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden bidang Iklim & Energi), Dr. Maruarar Sirait (Menteri Perumahan & KP), serta dr. Benjamin Paulus (Wakil Menteri Kesehatan).

Momen ini menjadi kesempatan berharga BP3OKP untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada para pemangku kebijakan nasional, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga pelayanan.

🗳️ **BP3OKP:** BP3OKP menyampaikan aspirasi Papua kepada menteri dan pejabat senior yang hadir. Momen lintas-lembaga seperti ini adalah kesempatan yang efektif dan tak tergantikan untuk memperjuangkan kepentingan Papua di level nasional.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Pendampingan event keagamaan, verifikasi program layanan kesehatan, dan penguatan biodiversitas Papua Barat.

L.3 Pembukaan PESPARANI VI Provinsi Papua Barat

7 Juli 2026 • Gedung Serba Guna Kabupaten Teluk Bintuni

Anggota BP3OKP RI beserta Pokja menghadiri Pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Katolik (Pesparani) ke-IV yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Teluk Bintuni, pada Selasa, 7 Juli 2026. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan terhadap terselenggaranya ajang keagamaan yang tidak hanya menjadi wadah pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga mempererat persaudaraan dan kebersamaan di Tanah Papua.

📌 **BP3OKP:** Kehadiran BP3OKP di PESPARANI VI di Teluk Bintuni memiliki makna ganda: mendukung event keagamaan sekaligus memperkuat kehadiran negara di Kabupaten Teluk Bintuni yang baru saja menghadapi situasi keamanan yang sensitif. BP3OKP menegaskan bahwa harmoni sosial berbasis nilai agama adalah fondasi pembangunan Papua.



3 ASPEK PELAKSANAAN

TONGGAK BERSEJARAH: Operasi perdana Kapal RS Terapung ke Distrik Tomu dan penguatan eliminasi TBC-HIV Papua Barat.

Layanan Kesehatan Bergerak Pertama Kali Menjangkau Distrik Tomu, Teluk Bintuni

L.4 Kolaborasi Dinkes–RSUD–BP3OKP: Pelayanan Kesehatan Bergerak Kapal Bintuni Sehat di Distrik Tomu

📅 16 Juli 2026 📍 Kapal Rumah Sakit Terapung Bintuni Sehat



Pelayanan Kesehatan bergerak Kapal Bintuni Sehat hadir di Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, untuk mendekatkan akses layanan Kesehatan bagi Masyarakat pesisir dan Terpencil. Selama dua hari pelaksanaan, tim medis dari dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Bersama RSUD teluk Bintuni memberikan pelayanan Kesehatan komprehensif, mulai dari skrining, pemeriksaan oleh dokter umum dan dokter spesialis, hingga berhasil melakukan dua Tindakan operasi dengan anestesi umum di ruang operasi kapal Bintuni sehat. Kegiatan merupakan usulan BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai dari tahap **perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan juga** sebagai mitra strategis dalam memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan layanan Kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat Papua. Dengan hadirnya Kapal Bintuni Sehat diharapkan menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten teluk Bintuni.

📌 **BP3OKP:** BP3OKP layanan kesehatan hadir di Distrik Tomu yang selama ini tidak terjangkau! Program ini adalah bukti BP3OKP sebagai motor penggerak mulai dari tahap **perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan..** penganggaran operasional kapal sebesar **Rp10 Miliar** yang telah dimasukkan oleh BP3OKP ke dalam RPJMD/Bappeda untuk periode 2025–2029.

✓ **Capaian:** layanan kesehatan bergerak menjangkau Distrik Tomu via Kapal RS Terapung; pemeriksaan umum, imunisasi, skrining TBC-HIV, dan konsultasi gizi terlaksana hingga berhasil melakukan dua Tindakan operasi dengan anestesi umu di ruang Operasi Kapal Bintuni Sehat; program Floating Hospital BP3OKP terwujud nyata.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Layanan Kesehatan Bergerak Pertama Kali Menjangkau Distrik Tomu, Teluk Bintuni

BP3OKP Menunjukkan peran aktif secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.



Operasi perdana Kapal RS Terapung ke Distrik Tomu dan penguatan eliminasi TBC-HIV Papua Barat.

3 ASPEK PELAKSANAAN

L.5 Audiensi Konservasi Indonesia — Program MOU 2023 Papua Barat

📅 10 Juli 2026 📍 Ruang Rapat BPP Lt. III, GKN Manokwari

BP3OKP Papua Barat Bersama konservasi Indonesia membangun sinergi untuk memperkuat upaya pembangunan yang selaras antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen mendorong berbagai program strategi yang tidak hanya menjaga kekayaan alam Papua Barat sebagai aset dunia, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan masa depan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. tiga pilar (stabilitas iklim, pelestarian perikanan & kelautan, transformasi sosial)..



L.6 Monev PPM TBC-HIV Papua Barat — 1.172 Kasus, Cakupan Baru 38%

📅 13 Juli 2026 📍 Hotel Vitta, Manokwari

Pokja Papua Sehat memberikan arahan dalam Rapat Monev PPM TBC-HIV secara hibrida.

Kegiatan ini difokuskan pada upaya pengendalian dan percepatan eliminasi kasus Tuberkulosis (TBC) di wilayah Provinsi Papua Barat melalui pendekatan lintas sektoral, evaluasi cakupan penemuan kasus, serta perumusan strategi pengobatan yang lebih efektif. Hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 1.172 kasus TBC di Papua Barat dengan cakupan penemuan sebesar 38%. Dalam arahnya, Bapak Felix Duwit menekankan pentingnya penerapan strategi TOSS (Temukan, Obati, Sembuhkan, Segerakan dilaporkan) serta penguatan sinergi anggaran lintas sektor tidak boleh ada ego sektoral guna memastikan penanganan TBC berjalan menyeluruh dan terintegrasi dari aspek medis hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui komitmen bersama dan optimalisasi jejaring fasilitas kesehatan ini, diharapkan target penemuan serta angka kesembuhan pasien dapat meningkat secara signifikan demi mewujudkan masyarakat Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.



3 ASPEK PELAKSANAAN

Ketahanan pangan, pendidikan, revisi regulasi MRP, dan Triple Mission Jakarta ke Sekretariat Wapres.

L.7

Panen Raya Padi 282 Ha — Ketahanan Pangan Nyata Kampung Mulya Prafi

📅 17 Juli 2026 📍 Kampung Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari

Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Sehat BP3OKP menghadiri Panen Raya Padi di Kampung Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Panen dilaksanakan di atas areal seluas 282 hektar — luas yang dipanen pada kegiatan ini mencapai 15 hektar. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada empat sektor: ketahanan pangan (stok beras terjaga, mengurangi ketergantungan dari luar daerah), ekonomi masyarakat (daya beli petani meningkat), peluang kerja (buruh panen, pengeringan gabah, logistik), dan kestabilan harga pasar (menekan inflasi komoditas pokok).



🔗 **BP3OKP:** BP3OKP menjadikan Panen Raya Prafi sebagai model ketahanan pangan berbasis lahan yang harus direplikasi: 282 ha yang kini produktif adalah bukti bahwa investasi cetak sawah memberikan hasil nyata. BP3OKP mendorong perluasan program ke Ransiki dan kabupaten lain dengan potensi lahan serupa.

✓ **Capaian:** Panen raya 282 ha Kampung Mulya Prafi terlaksana; stok beras daerah terjaga; daya beli petani OAP meningkat; model ketahanan pangan berbasis cetak sawah terbukti efektif.

L.8

Mendampingi Bupati Mansel, Tokoh Agama Papua & Kode Desa 100 Kampung Pegaf

📅 27 Juli 2026 📍 Set. Wapres RI, Istana Wapres & Kemendagri, Jakarta

Dalam satu hari, BP3OKP Papua Barat melaksanakan tiga misi koordinasi penting di Jakarta:



(1) **BUPATI MANSEL:** Mendampingi Bupati Bernard Mandacan dalam silaturahmi dengan Bpk. Afif (Set. Wapres) — tindak lanjut kunjungan Wapres ke Mansel: kakao, MBG, cetak sawah, infrastruktur.

(2) **TOKOH AGAMA:** Koordinasi tokoh agama Papua di Istana Wapres — menindaklanjuti aspirasi tentang ketenangan beribadah dan stabilitas sosial di Tanah Papua.

(3) **KODE DESA:** Penyerahan permohonan penerbitan kode desa atas pemekaran 100 Kampung Baru Definitif Kab. Pegunungan Arfak ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri — memastikan hak masyarakat adat Suku Sough terakomodir.

✓ **Capaian:** Tindak lanjut Wapres ke Mansel dikomunikasikan resmi; aspirasi tokoh-tokoh agama Papua tersampaikan ke Set. Wapres; permohonan kode desa 100 Kampung Baru Pegaf diterima Kemendagri.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Pertemuan BAIS TNI, assessment pendidikan, dan catatan makna strategis pelaksanaan Juli 2026.

L.9 Pertemuan dengan Direktur BAIS TNI — Aspirasi Keamanan Moskona

📅 29 Juli 2026 📍 Plaza Kalibata, Jakarta

Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Dalam pertemuan ini, BP3OKP menyerahkan surat resmi terkait penyampaian aspirasi masyarakat Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni — sebagai tindak lanjut dari berbagai surat aspirasi yang telah diterima BP3OKP.



🔗 **BP3OKP:** BP3OKP mendorong pendekatan dialog dan rekonsiliasi di Moskona — bukan militerisasi. Surat kepada BAIS TNI memastikan bahwa informasi intelijen tentang Moskona juga mempertimbangkan perspektif masyarakat.

✓ **Capaian:** Surat aspirasi Moskona Utara diterima BAIS TNI; pendekatan dialog dan rekonsiliasi diadvokasikan; koordinasi BP3OKP–aparatus keamanan untuk Moskona diperkuat.

L.10 Assessment Program Layanan Pendidikan SMA Taruna Kasuari Nusantara Manokwari

📅 29 Juli 2026 📍 SMA Taruna Kasuari Nusantara, Manokwari

Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Sehat, dan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat melaksanakan assessment program layanan pendidikan SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara melalui observasi lapangan, wawancara, pengumpulan data, dan telaah dokumen terkait tata kelola sekolah, kurikulum, dan kondisi sarana prasarana.

Assessment mengungkap: sekolah masih menggunakan lahan berstatus pinjam pakai (perlu kepastian legal), master plan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

🔗 **BP3OKP:** BP3OKP melakukan assessment multi-pokja — menggabungkan perspektif Sehat, Cerdas, dan Produktif dalam satu kunjungan. Ini adalah pendekatan holistik: sekolah yang berkualitas harus memiliki legalitas lahan yang jelas, master plan yang realistis, dan program yang relevan dengan kebutuhan OAP Papua Barat.

✓ **Capaian:** Assessment SMA Taruna Kasuari terlaksana; masalah status lahan pinjam pakai teridentifikasi sebagai prioritas penyelesaian; rekomendasi penyesuaian master plan disusun.

Makna Strategis Aspek Pelaksanaan Juli 2026

Juli 2026 capaian : Kapal RS Terapung PERTAMA KALI beroperasi ke Distrik Tomu — program Floating Hospital yang diadvokasikan BP3OKP sejak Mei 2026 akhirnya menjadi kenyataan.

3 ASPEK PELAKSANAAN



L.10

**Assessment Program Layanan Pendidikan SMA Taruna Kasuari
Nusantara Manokwari**



29 Juli 2026



SMA Taruna Kasuari Nusantara, Manokwari

3 ASPEK PELAKSANAAN

Pertemuan BAIS TNI, assessment pendidikan, dan catatan makna strategis pelaksanaan Juli 2026.

L.11 Koordinasi ke Sekretariat Wakil Presiden Republik

📅 13 Juli 2026 📍 Sekretariat Wakil Presiden

Pokja Papua Produktif BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan koordinasi ke sekretariat wakil Presiden RI di Jakarta. Dalam rangka tindak lanjut penyampaian 1. Dokumen Aspirasi Masyarakat Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Utara Jauh Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Dokumen Aspirasi Masyarakat tentang Harapan Penyelesaian Konflik dan Ajakan Kembali ke dalam Pangkuan NKRI. 3. Permohonan Keikutsertaan dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-81 Tahun, tanggal 17 Agustus 2026.

✓ **Capaian:** Surat aspirasi diterima, Komunikasi BP3OKP – Sekretariat Wakil Presiden diperkuat.



4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Penguatan regulasi daerah, koordinasi kelembagaan, dan penguatan ekosistem pendidikan tinggi Papua Barat.

T.1

Koordinasi Kemendagri Ditjen Kemendagri membahas langkah-langkah strategis dalam penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah

📅 15 Juli 2026 📍 SwissBell Hotel, Jayapura

Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, melakukan koordinasi strategis bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) di SwissBell Hotel Jayapura, pada 15 Juli 2026.



Pertemuan ini secara khusus membahas langkah-langkah strategis dalam penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah Papua Barat, termasuk penguatan materi muatan naskah akademik yang komprehensif. Ditekankan pentingnya sinergi dan asistensi teknis dari Kemendagri agar proses harmonisasi regulasi — khususnya Perdasus — dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan selaras dengan perundang-undangan nasional.

🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP memastikan bahwa Perdasus Papua Barat memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang kuat — bukan sekadar formalitas regulasi. Koordinasi langsung dengan Ditjen Otda Kemendagri adalah bukti bahwa BP3OKP berperan aktif menjembatani kebutuhan regulasi daerah dengan mekanisme perundang-undangan nasional.

✓ **Capaian:** Langkah-langkah strategis penyusunan Perdasus Papua Barat dikonsultasikan ke Ditjen Otda Kemendagri; asistensi teknis naskah akademik disepakati; harmonisasi regulasi dipercepat.

T.2

MUNAS VI Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP-PTSI)

📅 15–16 Juli 2026 📍 Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park Hotel

Drs. Arius Mofu, M.Pd (Sekretaris YPTM Papua Barat dan POKJA Papua Cerdas) mewakili Papua Barat dalam Musyawarah Nasional VI Asosiasi BP-PTSI di Jakarta, 15–16 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan Papua Barat secara aktif menyuarakan isu-isu strategis terkait pendidikan tinggi swasta di Tanah Papua — termasuk keterbatasan akses, kekurangan dosen, dan minimnya hibah operasional untuk PT yang melayani mahasiswa OAP.

Forum ini menjadi platform penting untuk memperjuangkan keberpihakan kebijakan pendidikan tinggi nasional terhadap wilayah-wilayah tertinggal seperti Papua.



🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP Papua Barat mendorong agar rekomendasi MUNAS BP-PTSI mencakup kebijakan afirmatif khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta di Papua — termasuk exemption moratorium PTN, hibah operasional, dan rekrutmen dosen berbasis kebutuhan wilayah OAP.

✓ **Capaian:** Isu pendidikan tinggi swasta Papua Barat disuarakan dalam forum nasional; rekomendasi kebijakan afirmatif untuk PT di wilayah OAP diadvokasikan ke Kemendikti.

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Revisi regulasi MRP, penguatan sekolah YPK, dan evaluasi kinerja internal BP3OKP Papua Barat.

T.3

Pembahasan Revisi PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP)

21 Juli 2026 Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta



Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) di Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta, pada 21 Juli 2026. BP3OKP turut berpartisipasi sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki mandat dalam penguatan kelembagaan adat Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.

Revisi PP ini sangat penting karena MRP merupakan lembaga representasi kultural OAP yang kewenangannya perlu diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika pemekaran provinsi baru Papua.

🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP mendorong agar revisi PP No. 54 benar-benar memperkuat — bukan memperlemah — peran MRP sebagai representasi kultural OAP. Dalam era enam provinsi Papua, kewenangan MRP dalam konsultasi kebijakan Otsus harus dijamin secara eksplisit dalam regulasi.

✓ **Capaian:** penguatan kewenangan MRP dalam kerangka enam provinsi Papua diadvokasikan; harmonisasi regulasi MRP dengan UU Otsus dipercepat.

T.4

Workshop Pengelolaan Program Sekolah YPK & Penyusunan Perangkat Pembelajaran

28 Juli 2026 Kabupaten Manokwari, Papua Barat



Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat menghadiri Workshop Pengelolaan Program Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kabupaten Manokwari. YPK merupakan salah satu yayasan pendidikan terbesar yang melayani OAP di Papua Barat.

Workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas tata kelola sekolah YPK dan kualitas perangkat pembelajaran yang relevan dengan konteks budaya dan kebutuhan OAP.

🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP mendukung penguatan sekolah YPK sebagai bagian dari komitmen terhadap pendidikan berbasis yayasan yang melayani OAP. Sejalan dengan Permendikdasmen No. 1/2025 tentang redistribusi guru, BP3OKP mendorong YPK mendapat prioritas penempatan guru ASN/PPPK yang berkualitas.

✓ **Capaian:** sinergi BP3OKP–YPK dalam pendidikan Papua Barat diperkuat.

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Revisi regulasi MRP, penguatan sekolah YPK, dan evaluasi kinerja internal BP3OKP Papua Barat.

T.3

BPP SE WILAYAH TANAH PAPUA PERKUAT SINERGI MELALUI RAPAT INTERNAL DI JAYAPURA

15- 16 Juli 2026 📍 Ruang Rapat BPP , GKN Jayapura

Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Internal Penilaian Kinerja Pokja yang diselenggarakan di Sekretariat BPP Lantai 5, Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, pada Kamis, 15-16 Juli 2026. Rapat ini menjadi wadah untuk mengevaluasi Pelaksanaan program, memperkuat koordinasi antarwilayah menyamakan Langkah dalam mengawal implementasi otonomi khusus guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan bagi tanah papua. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat papua serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan diseluruh wilayah papua. Dan juga pada pertemuan ini menjadi upaya evaluasi dan penguatan kinerja setiap kelompok kerja di lingkungan BP3OKP guna memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat papua barat, diharapkan sinergi dan kualitas kerja antar pokja dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi bp3okp semakin efektif, akuntabel dan tepat sasaran.





Kelompok Kerja (Pokja)

Papua Sehat

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"

Berdasarkan Monev PPM TBC-HIV, operasi perdana Kapal RS Terapung ke Distrik Tomu, dan forum kesehatan Juli 2026.

1 Kendala Pembangunan

- 1.172 kasus TBC di Papua Barat per Juni 2026 dengan cakupan penemuan hanya 38% — 62% kasus masih tersembunyi di masyarakat
- Secara nasional: >1 juta kasus TBC (367 per 100.000 penduduk); Papua menyumbang lebih dari 95% beban nasional
- Malaria: >706.297 kasus nasional 2025; Papua tetap sebagai episentrum krisis malaria Indonesia
- Kapal RS Terapung baru beroperasi pertama kali ke Distrik Tomu — masih banyak distrik pesisir dan pulau yang belum terjangkau
- Distribusi 392 tenaga medis OAP penugasan khusus belum terlaksana seluruhnya; kekurangan dokter di daerah 3T masih kritis
- Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 95% dan memperoleh penghargaan. Masalah utama bukan pada angka dokumen kepatuhan pembayaran pemda, melainkan pada implementasi di lapangan.
- Penyediaan sarana-prasarana, ketersediaan dokter, dan tenaga medis belum diperhatikan dengan optimal, sehingga pelayanan belum sampai secara maksimal ke masyarakat.

2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- Ego sektoral dalam penanganan TBC: Dinkes, RS, laboratorium, dan OPD lain belum terintegrasi; Pokja Papua Sehat BP3OKP harus terus mendorong sinergi
- Kapal RS Terapung baru beroperasi ke Distrik Tomu; perlu jadwal operasional reguler ke distrik-distrik lain yang masih terisolir
- Strategi TOSS (Temukan, Obati, Sembuhkan, Segerakan) TBC belum diterapkan konsisten di semua fasyankes Papua Barat
- Intervensi TB-HIV lintas sektor masih lemah: TBC-HIV membutuhkan pendekatan terintegrasi yang belum tersedia
- Kader kesehatan kampung tidak merata dan insentifnya rendah — menghambat program promosi kesehatan preventif di pedalaman
- Realisasi program MBG dan gizi belum terhubung dengan program penurunan stunting secara terstruktur per kampung
-

Berdasarkan operasi Kapal RS Terapung, Monev TBC-HIV, Evaluasi Kapal, Deklarasi Otsus, dan kegiatan kesehatan Juli 2026.

3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- ★Kapal RS Terapung 'Bintuni Sehat' PERDANA beroperasi ke Distrik Tomu (15–16 Jul): layanan kesehatan hadir di wilayah pesisir terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau — pemeriksaan umum, imunisasi, skrining TBC-HIV, konsultasi gizi, dan rujukan, Kapal Rumah Sakit terapung ini diusung oleh BP3OKP RI Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Sehat mulai dari tahap **perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan**.
- Monev PPM TBC-HIV Papua Barat (13 Jul): 1.172 kasus TBC terdata, strategi TOSS ditekankan, ego sektoral dihilangkan — Pokja Papua Sehat memberikan arahan teknis lintas sektor
- Rapat Evaluasi & Reoperasionalisasi Kapal RS Terapung Bintuni Sehat (8 Jul): strategi operasional ke distrik-distrik pesisir Bintuni ditetapkan
- Koordinasi BPJS-UHC: tindak lanjut 5 komitmen aksi Juni 2026 terus berjalan — reaktivasi OAP-PBI, sinkronisasi data SIAP, pelunasan hutang BPJS pemma
- Deklarasi Komitmen 18 Rencana Aksi Dana Otsus (16 Jul): alokasi Dana Otsus bidang kesehatan masuk dalam 18 rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh 6 Gubernur
- Kebaktian YPPII Batu: aspek kesehatan masyarakat Papua disampaikan kepada Wakil Menteri Kesehatan RI yang hadir sebagai pembicara
- Panen Raya Prafi (17 Jul): ketahanan pangan mendukung penurunan stunting — program gizi berbasis pangan lokal dipromosikan

4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Mengawal operasi perdana Kapal RS Terapung ke Distrik Tomu dan mendorong jadwal operasional reguler minimal 2x/bulan ke seluruh distrik pesisir terpencil Bintuni
- Memberikan arahan teknis dalam Monev TBC-HIV: menghilangkan ego sektoral, menerapkan strategi TOSS konsisten, dan memperkuat jejaring fasyankes dalam penanganan TBC
- Mendorong percepatan distribusi 392 tenaga medis OAP penugasan khusus — 9 Puskesmas dan 6 dokter spesialis ke RS belum semua terealisasi
- Memastikan alokasi Dana Otsus bidang kesehatan masuk dalam 18 rencana aksi Deklarasi Komitmen Bersama yang ditandatangani Gubernur
- Mengadvokasi intervensi TBC-HIV terintegrasi: pasien ko-infeksi harus mendapat layanan terpadu dari satu pintu
- Mendorong percepatan sinkronisasi data BPJS-Dukcapil dan reaktivasi OAP-PBI yang masih tertunda dari komitmen Juni 2026
- Menghubungkan program Panen Raya Prafi dengan program gizi preventif — 'ketahanan pangan adalah ketahanan gizi'

Pokja REKOMENDASI — PAPUA SEHAT

Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan Juli 2026.

1 Tetapkan jadwal operasional Kapal RS Terapung minimal 2x/bulan: prioritaskan Distrik Tomu, Moskona Utara, Kuri Wamesa, dan pulau-pulau terpencil Bintuni

3 Implementasikan strategi TOSS TBC di semua fasyankes: bentuk tim respon cepat kasus baru di setiap puskesmas, eliminasi ego sektoral

5 Percepat sinkronisasi data BPJS-Dukcapil via SIAP dan reaktivasi seluruh OAP-PBI yang terdeaktivasi — target September 2026

7 Kembangkan kader kesehatan kampung berbasis insentif Dana Otsus: 1 kader per kampung di seluruh 1.743 kampung Papua Barat

2 Selesaikan distribusi 392 tenaga medis OAP penugasan khusus ke 9 Puskesmas dan 6 dokter spesialis ke RS Papua Barat — evaluasi secara bulanan

4 Wajibkan intervensi TB-HIV terintegrasi: setiap pasien TBC di Papua Barat wajib dites HIV; setiap pasien HIV wajib diskriming TBC

6 Hubungkan program Panen Raya Prafi dan ketahanan pangan lokal dengan intervensi gizi: petani OAP menjadi pemasok dapur MBG

8 Laporkan kemajuan 18 Rencana Aksi Dana Otsus bidang kesehatan secara triwulanan kepada BP3OKP dan KPK — pastikan implementasi bukan sekadar tanda tangan

L A P O R A N B U L A N A N

KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA PRODUKTIF

PERIODE JULI 2026

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan
Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan
Provinsi Papua Barat



SINKRONISASI • HARMONISASI • EVALUASI • KOORDINASI (SHEK)



Ringkasan Eksekutif

Selama Bulan Juli 2026, Pokja Papua Produktif BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat menjalankan kegiatan strategis pada dua jalur: kegiatan yang menjadi ranah langsung Papua Produktif, dan kegiatan strategis bersama lintas Pokja bersama BP3OKP Perwakilan Papua Barat.

Pada jalur Papua Produktif, penekanan kerja diarahkan pada audiensi kerja sama pembangunan berkelanjutan dengan Konservasi Indonesia, dukungan ketahanan pangan di Kampung Mulya (Distrik Prafi), penguatan sinergi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, serta koordinasi tindak lanjut proses rekonsiliasi Wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni menuju NKRI.

Pada jalur kegiatan strategis bersama, Pokja turut ambil bagian dalam agenda besar BP3OKP-RI se-Tanah Papua, di antaranya penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Papua bersama KPK dan Kemendagri, Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) dan Komite Eksekutif se-6 Provinsi, serta pendampingan koordinasi ke Sekretariat Wakil Presiden RI.

Tugas & Fungsi Pokja Papua Produktif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan BP3OKP

T TUGAS

- Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui demokrasi berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- Bersinergi mewujudkan Desentralisasi Asimetris sesuai kekhususan daerah.
- Melaksanakan koordinasi lintas lembaga di bidang kesejahteraan masyarakat.
- Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda mendampingi OAP demi kesejahteraan & pemerataan ekonomi.
- Memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otsus.
- Mendukung program kerja daerah di bidang peningkatan ekonomi masyarakat.

F FUNGSI

- Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan Otsus.
- Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan masyarakat dalam pembinaan & pengawasan penggunaan Dana Otsus oleh OPD.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan kepada Presiden melalui Wakil Presiden.

Capaian Strategis — Papua Produktif

1

Audiensi Konservasi Indonesia — Pembaruan kerja sama pembangunan berkelanjutan (MOU 2023); penyelarasan program mitra dengan RIPPP/RAPPP di kawasan “Mahkota Permata Tanah Papua” ($\pm 2,3$ juta ha).

2

Koordinasi Rekonsiliasi Moskona — Tindak lanjut ke Sekretariat Wakil Presiden RI atas penyerahan diri 37 anggota OPM Wilayah Moskona, Kab. Teluk Bintuni, menuju NKRI.

3

Ketahanan Pangan Kampung Mulya — Kegiatan mendukung kestabilan pasokan pangan, penekanan inflasi harga kebutuhan pokok, dan peningkatan pendapatan petani di Distrik Prafi, Manokwari.

4

Sinergi RAPPP 2025–2029 — Rapat penguatan sinergi dan komitmen pelaksanaan RAPPP sesuai Perpres No. 107/2025 bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika.

Capaian Strategis — Kegiatan Bersama

1

HUT Bhayangkara Polri ke-80 — Kehadiran mewakili BP3OKP dalam peringatan HUT Bhayangkara di Polda Papua Barat, mempererat sinergi dengan institusi Kepolisian.

2

Rakor Tata Kelola & Anti-Korupsi Otsus — Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua membahas rekomendasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi Dana Otsus se-Tanah Papua.

3

Deklarasi Komitmen Bersama (KPK) — Penandatanganan 18 rencana aksi tata kelola & pertanggungjawaban Dana Otsus, disaksikan Ketua KPK dan Irjen Otda Kemendagri, oleh 6 Provinsi se-Tanah Papua.

4

Rakor BPP & Komite Eksekutif — Rapat koordinasi Badan Pengarah Papua bersama Komite Eksekutif Perwakilan enam Provinsi Papua di Jayapura.

5

Revisi PP No. 54/2021 tentang MRP — Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua sebagai penguatan kelembagaan adat dalam kerangka Otsus.

6

Assessment SMA Taruna Kasuari Nusantara — Penilaian program layanan pendidikan meliputi tata kelola sekolah, kurikulum, dan observasi lapangan di Manokwari.

Audiensi Konservasi Indonesia

 Jumat, 10 Juli 2026

 Ruang Rapat BPP Lantai III, GKN Manokwari

HASIL KEGIATAN

Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat bersama Pokja Papua Produktif, Papua Sehat, dan Papua Cerdas menerima audiensi Konservasi Indonesia untuk membahas perkembangan kerja sama sesuai MOU 2023, meliputi tiga pilar: stabilitas iklim, pelestarian perikanan-kelautan, dan ekonomi restoratif di sektor hutan (kawasan “Mahkota Permata Tanah Papua”, ±2,3 juta ha) dan sektor laut (Bomberay, Kaimana-Fakfak).

CAPAIAN

Disepakati bahwa seluruh program dari 30 lembaga non-pemerintah mitra pengelolaan bentang alam wajib diselaraskan dengan RIPPP (Perpres No. 24/2023) dan RAPPP 2025–2029 (Perpres No. 107/2025), serta dilaporkan secara terukur pada Musrenbang Mitra Pembangunan yang difasilitasi Bappeda Provinsi.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Mengawal proses penyelarasan program mitra dengan RIPPP/RAPPP; menindaklanjuti kejelasan kolaborasi program perubahan iklim (Lentera); mendorong penerbitan SK Gubernur/SKB Dua Gubernur untuk Forum Kolaborasi Multi-Pihak Bentang Alam.



Koordinasi Rekonsiliasi Wilayah Moskona

📅 Senin – Kamis, 13–16 Juli 2026

📍 Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta

HASIL KEGIATAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. ST.008/BP3OKP-RI/PB/VII/2026, Anggota Pokja Papua Produktif melaksanakan koordinasi ke Sekretariat Wakil Presiden RI menindaklanjuti tiga dokumen aspirasi masyarakat Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, pasca penyerahan diri 37 anggota OPM Wilayah Moskona pada 27 Juni 2026.

CAPAIAN

Tersampainya aspirasi masyarakat terkait harapan penyelesaian konflik, 12 poin tuntutan pembangunan wilayah Moskona, serta permohonan keikutsertaan dua perwakilan masyarakat dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Negara sebagai simbol rekonsiliasi.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

BP3OKP berperan sebagai jembatan penghubung aspirasi akar rumput dengan pengambil kebijakan nasional; mengawal proses rekonsiliasi dengan pendekatan kemanusiaan dan penghormatan masyarakat adat menuju Indonesia Emas 2045.



Dukungan Ketahanan Pangan Kampung Mulya

 Jumat, 17 Juli 2026

 Kampung Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Produktif bersama Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan strategis di Kampung Mulya, Distrik Prafi, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan pangan daerah serta menekan inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

CAPAIAN

Terbukanya peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal, serta terbukanya peluang kerja musiman bagi masyarakat sekitar melalui optimalisasi lahan pertanian produktif di Distrik Prafi.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Mendorong keberlanjutan pendampingan petani di Distrik Prafi; menyinkronkan program ketahanan pangan lokal dengan kebijakan pengendalian inflasi daerah dan RAPPP Papua Produktif.



Rakor Sinergi RAPPP 2025–2029

 Kamis, 30 Juli 2026

 Ballroom BPKAD Kab. Mimika (Luring & Daring via Zoom)

HASIL KEGIATAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, Pokja Papua Produktif bersama Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas mengikuti rapat penguatan sinergi dan komitmen pelaksanaan RAPPP se-wilayah Papua Tengah di Kabupaten Mimika.

CAPAIAN

Terbangunnya kesepahaman bersama pemangku kepentingan daerah mengenai prioritas program RAPPP 2025–2029 dan pentingnya keselarasan perencanaan daerah dengan dokumen RIPP/ RAPPP secara konsisten.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Mengawal integrasi program Papua Produktif ke dalam RKPD dan Renja SKPD terkait; memastikan pelaporan capaian RAPPP dilakukan tepat waktu dan terukur oleh Pemda setempat.



Rakor Perbaikan Tata Kelola & Anti-Korupsi Otsus

 Selasa, 15 Juli 2026

 Ruang Rapat BPP, GKN Jayapura

HASIL KEGIATAN

Rapat internal Badan Pengarah Papua membahas empat agenda utama: tata kelola dan akuntabilitas kepala daerah, situasi keamanan dan proses reintegrasi mantan anggota kelompok bersenjata, alokasi dan pencairan Dana Otsus 2025–2026, serta persiapan pertemuan dengan KPK.

CAPAIAN

Dilaporkannya kondisi keamanan Papua Barat pasca peningkatan kehadiran militer, keberhasilan BP3OKP memfasilitasi penyerahan diri 37 mantan anggota bersenjata Wilayah Moskona, dan pembahasan sistem KPI baru bagi kinerja Pokja BP3OKP.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti persiapan penandatanganan Pakta Integritas kepala daerah; memperkuat koordinasi Komite Eksekutif dengan BP3OKP; mengawal krisis anggaran operasional perwakilan daerah.



Deklarasi Komitmen Bersama Tata Kelola Dana Otsus

 Kamis, 16 Juli 2026

 Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura

HASIL KEGIATAN

BP3OKP Perwakilan Papua Barat bersama seluruh Anggota BP3OKP se-Tanah Papua, Gubernur, DPRD/DPRD, MRP, BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, dan K/L terkait menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus se-Wilayah Tanah Papua.

CAPAIAN

Ditandatangani Deklarasi Komitmen Bersama berisi 18 rencana aksi tata kelola dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Papua oleh 6 Provinsi se-Tanah Papua, disaksikan langsung Ketua KPK dan Irjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, mencakup percepatan Perdatus, integrasi SIPD-SIKD Otsus-SIPPP, dan penguatan peran APIP.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

BP3OKP Papua Barat mengawal implementasi 18 rencana aksi di tingkat provinsi; mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur terkait sistem penatausahaan penerimaan Otsus sesuai PMK No. 33/2024.



Rakor Badan Pengarah Papua & Komite Eksekutif

 Kamis, 23 Juli 2026

 Kantor BPP Lantai 4 & 5, Jayapura

HASIL KEGIATAN

Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat bersama Pokja Papua Produktif, Papua Sehat, Papua Cerdas, dan POLHUKAM menghadiri Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) dan Komite Eksekutif Perwakilan enam Provinsi Papua.

CAPAIAN

Terjalinnya koordinasi lintas provinsi dalam penyelarasan agenda percepatan pembangunan Otonomi Khusus se-Tanah Papua antara Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Memperkuat mekanisme komunikasi rutin antara BP3OKP Perwakilan Provinsi dengan Komite Eksekutif Pusat guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.



Assessment Layanan Pendidikan SMA Taruna Kasuari Nusantara

 Rabu, 29 Juli 2026

 SMA Taruna Kasuari Nusantara, Manokwari

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Produktif bersama Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas melaksanakan assessment program layanan pendidikan SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara, meliputi observasi lapangan, wawancara, pengumpulan data, dan telaah dokumen tata kelola sekolah serta kurikulum.

CAPAIAN

Diperolehnya gambaran awal kondisi tata kelola dan kurikulum sekolah sebagai bahan evaluasi lintas Pokja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik di Papua Barat.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola dan kurikulum berbasis hasil assessment; menindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan dan pengelola sekolah terkait.



PENUTUP LAPORAN

Kesimpulan & Rekomendasi Umum

- Pokja Papua Produktif konsisten menjalankan fungsi SHEK, baik pada kegiatan yang menjadi ranah langsungnya maupun kegiatan strategis bersama lintas Pokja BP3OKP Perwakilan Papua Barat.
- Program ketahanan pangan Kampung Mulya, sinergi RAPPP 2025–2029, dan kerja sama dengan Konservasi Indonesia perlu terus dikawal hingga tahap realisasi bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.
- Deklarasi Komitmen Bersama Tata Kelola Dana Otsus bersama KPK menjadi tonggak penting yang harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Papua Barat.
- Proses rekonsiliasi Wilayah Moskona menuju NKRI perlu terus dikawal dengan pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Tanah Papua.

Terima Kasih

Demikian Laporan Bulanan Kegiatan Pokja Papua Produktif periode Juli 2026 disampaikan untuk diketahui, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan petunjuk lebih lanjut.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
Perwakilan Provinsi Papua Barat — Pokja Papua Produktif

BPP

BADAN PENGARAH PERCEPATAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA CERDAS (PENDIDIKAN)

LAPORAN BULANAN (MONTHLY REPORT) JULI 2026



RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)
PROVINSI PAPUA BARAT
JULI 2026

8,07%

Sumber Data: BPS



ANGKA PARTISIPASI MURNI
SMA-SMK DAN SEDERAJAT (APM)
PROVINSI PAPUA BARAT
JULI 2026

57,63%

Sumber Data: BPS



ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
PROVINSI PAPUA BARAT / JULI 2026

29,575 ORANG

Sumber Data: Dashboard ATS Kemdikbud



PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT



Papua Cerdas, Papua Maju!



Penyerahan Dokumen Pernyataan Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Pengembalian Pengelolaan SMA dan SMK Kembali ke Provinsi di Tanah Papua ke Asisten Deputi Wapres pada Juni 2026

RINGKASAN KEGIATAN

- ✓ Penyerahan dokumen pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi di Tanah Papua
- ✓ Mengikuti Munas VI ABPPTS Papua Barat sebagai Pembina
- ✓ Rapat Kerja I YPK Tanah Papua di Jayapura
- ✓ Penguatan koordinasi dan sinergi program pendidikan Papua Cerdas
- ✓ Komitmen bersama mendorong percepatan pendidikan berkualitas di Papua Barat



Pokja Papua Cerdas Papua Barat Bersama Wakil Ketua 1 DPR PB, Wakapolda PB, diundang dalam sebagai Pembina ABPPTS Papua Barat untuk mengikuti Munas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi swasta se-Indonesia pada Juli 2026. Tampak Bersama Wamendikstisaintek dan Komisi X DPR RI



Pokja Papua Cerdas Papua Barat dan Papua Barat Daya diundang mengikuti Rapat Kerja I YPK Tanah Papua di Jayapura Juli 2026



KOMITMEN BERSAMA

**"Papua Cerdas,
Papua Maju,
Indonesia Maju!"**





10 ISU STRATEGIS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAN TANAH PAPUA

Analisis Permasalahan, Solusi, Rekomendasi Strategis, dan Peran Pokja Papua Cerdas BP3OKP RI

No	Isu Strategis	Permasalahan Utama	Solusi Strategis	Rekomendasi Strategis	Peran Pokja Papua Cerdas BP3OKP RI
1	 Pengembalian Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi	Fragmentasi pengelolaan SMA/SMK oleh kabupaten/kota menyebabkan tata kelola dan mutu pendidikan menengah tidak seragam.	Merevisi PP No.106 Tahun 2021 beserta Lampirannya agar pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemerintah Provinsi.	Pemerintah Pusat menetapkan kembali kewenangan SMA/SMK kepada Provinsi sebagaimana berlaku di provinsi lain.	Menyusun kajian akademik, mengawal revisi regulasi, dan memfasilitasi koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah.
2	 Penguatan Pembiayaan Pendidikan Menengah	Kemampuan fiskal kabupaten/kota terbatas sehingga pembangunan sarana, pemerataan guru, dan peningkatan mutu belum optimal.	Pembiayaan pendidikan menengah dipusatkan pada Pemerintah Provinsi dengan dukungan APBN, APBD, dan Dana Otsus.	Menyusun sistem pembiayaan dan standar pelayanan pendidikan menengah yang seragam.	Menghitung kebutuhan anggaran, menyusun <i>policy brief</i> , dan mengadvokasi dukungan fiskal pendidikan.
3	 Peningkatan Akses Program Nasional Pendidikan	Guru, kepala sekolah, dan peserta didik belum memperoleh akses yang merata terhadap program Kemendikdasmen.	Mengembangkan sistem pendidikan menengah berbasis data dan memperluas akses program nasional.	Menindaklanjuti Kesepakatan Nabire 2025 dan dukungan Pemerintah Papua Barat Tahun 2026.	Mengintegrasikan data pendidikan Papua dan memfasilitasi implementasi program nasional.
4	 Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	Ketimpangan kebijakan dan pendanaan antara PTN dan PTS menyebabkan daya saing PTS rendah.	Kebijakan afirmatif melalui APBN, APBD, Dana Otsus, hibah, digitalisasi, dan peningkatan mutu dosen.	Menetapkan PTS sebagai mitra strategis pembangunan SDM Papua Barat.	Menyusun roadmap pengembangan PTS dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, LLDIKTI, dan dunia usaha.
5	 Reformasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Penurunan mahasiswa baru akibat sistem PMB PTN dan keterbatasan pendanaan PTS.	Reformasi PMB nasional dan diversifikasi sumber pendanaan PTS.	PMB PTN diselesaikan paling lambat Juni melalui jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.	Mengawal advokasi kebijakan PMB nasional dan mendukung promosi PTS di Papua Barat.
6	 Peningkatan Mutu dan Daya Saing PTS	Mutu dosen, kurikulum, laboratorium, dan kemitraan belum optimal.	Revitalisasi kurikulum berbasis kebutuhan daerah, smart campus, peningkatan dosen, dan kemitraan.	Memperkuat kolaborasi Pemerintah, LLDIKTI, ABP PTS, industri, dan perguruan tinggi.	Mengidentifikasi kebutuhan SDM Papua Barat dan memfasilitasi kolaborasi riset serta inovasi.
7	 Revitalisasi Tata Kelola YPK Tanah Papua	Tata kelola organisasi pascapenggabungan tiga yayasan belum terintegrasi.	Membangun Good Christian Education Governance, EMIS YPK, SOP, dan sistem manajemen terpadu.	Menyusun dan melaksanakan Masterplan Revitalisasi YPK 2026–2035.	Memberikan pendampingan penyusunan roadmap, kebijakan, dan transformasi tata kelola pendidikan YPK.
8	 Transformasi Mutu Pendidikan YPK	Kompetensi guru, kepala sekolah, sarana, dan pemanfaatan AI masih terbatas.	Transformasi pembelajaran berbasis AI, STEM, Deep Learning, literasi digital, dan pendidikan karakter Kristen.	Mengembangkan Smart School, Teacher Development Center, dan sekolah unggulan YPK.	Memfasilitasi pelatihan, inovasi pembelajaran, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.
9	 Kemandirian Pembiayaan dan Kemitraan YPK	Pembiayaan dan kemitraan strategis belum berkelanjutan.	Diversifikasi pendanaan melalui APBN, APBD, BOS, Otsus, CSR, hibah, alumni, gereja, dan unit usaha produktif.	Membentuk Dana Abadi YPK (Education Endowment Fund) serta memperluas jejaring nasional dan internasional.	Menghubungkan YPK dengan pemerintah, donor, dunia usaha, gereja, dan lembaga pembangunan.
10	 Transformasi Pendidikan Masa Depan Papua	Sistem pendidikan belum sepenuhnya adaptif terhadap AI, Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan kebutuhan SDM masa depan.	Menyusun roadmap pendidikan berbasis inovasi, STEM, AI, coding, riset, kewirausahaan, dan kebutuhan pembangunan Papua.	Menjadikan Papua sebagai pusat pengembangan SDM unggul melalui pendidikan berkualitas, digital, inklusif, dan berdaya saing global.	Menjadi think tank pembangunan pendidikan Papua melalui kajian strategis, integrasi kebijakan, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Wakil Presiden RI.

KESIMPULAN

Sepuluh isu strategis tersebut merupakan agenda prioritas transformasi pendidikan di Tanah Papua yang mencakup penguatan tata kelola pendidikan menengah, pengembangan perguruan tinggi swasta, revitalisasi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), serta percepatan transformasi pendidikan berbasis teknologi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam keseluruhan agenda tersebut, Pokja Papua Cerdas BP3OKP RI memiliki peran strategis sebagai pusat kajian (think tank), koordinator, fasilitator, dan pengawal kebijakan untuk memastikan setiap rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.



POKJA
PAPUA CERDAS
BP3OKP RI



BERSAMA MEMBANGUN
PAPUA CERDAS DAN BERDAYA SAING



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

— KELOMPOK KERJA (POKJA) —

TERIMA KASIH

Atas perhatian, dukungan, kerja sama,
dan komitmen kita untuk pendidikan yang lebih
berkualitas di Tanah Papua.



*Papua Cerdas, Papua Maju,
Indonesia Maju!*



**POKJA
PAPUA CERDAS
BP3OKP RI**

**PERWAKILAN
PROVINSI PAPUA BARAT**



BERSINERGI

Membangun kolaborasi
untuk kemajuan Papua



BERKOMITMEN

Berkomitmen pada
pendidikan berkualitas



BERINOVASI

Berinovasi untuk solusi
yang berkelanjutan



BERDAMPAK

Berdampak nyata bagi
generasi Papua

Bersama kita wujudkan generasi Papua yang cerdas, berkarakter,
kompeten dan berdaya saing global



JULI 2026

Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh Badan Pengarah Papua (BPP) dan diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen, silakan periksa QR Code pada laman <https://satu.kemendikbud.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>